

# PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur)

Priola Meilida <sup>1)</sup>

Aris Eddy Sarwono <sup>2)</sup>

Dewi Saptantinah Puji Astuti <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> priolameilida60@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the performance of the East Kotawaringin Regency government. This research was conducted at the local government of East Kotawaringin Regency. The type of data used is secondary data. The results of this study address the financial ratios of the decentralization rate of 11.60% in the very low category. The independence ratio of 11.60% falls into the very low category with an Instructive relationship pattern. The dependent ratio is 72.15% in the medium category. The effective ratio of 115.43% belongs to the effective category. An efficient ratio of 90.38% is included in the less efficient category. The growth ratio of 24.34% is in the medium category. The financial performance of the local government of East Kotawaringin Regency can be accessed well when compared to the Districts and Cities in Central Kalimantan Province together with West Kotawaringin and Palangkaraya Districts.*

**Keywords:** *financial ratio, financial performance, local government*

## PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki 16.056 pulau, dengan wilayah yang sangat luas terdiri dari 34 provinsi pada saat ini (Badan Pusat Statistik: 3). Pemerintahan daerah mendapat keleluasaan dari pemerintah pusat untuk membangun daerah otonom. Otonomi daerah dibuat agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efektif. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengatur/mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai pemerintahannya. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Memesah dalam Halim: 2004).

Pengelolaan keuangan daerah sangatlah besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kebesarannya atau sehubungan berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu daerah itu sendiri karena daerah dapat menjadi daerah yang mampu mengembangkan kebesarannya atau sehubungan berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah (Rempowatu dan Tirayoh: 2016). Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam

pengelolaan keuangan yang tercantum dalam APBD. Menurut Halim (2004: 15), APBD adalah suatu Anggaran daerah yang artinya, kinerja keuangan dapat menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh sebab itu kinerja pemerintah daerah perlu diukur untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Mahmudi (2010: 142) menjelaskan, analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang menghubungkan atau memperbandingkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur meraih penghargaan peningkatan prestasi dalam SAKIP dari Kemenpan RB. SAKIP tahun 2017 berpredikat B (baik). Wakil Bupati Kotawaringin Timur Mukri “Saya bersama Pak Bupati monitor langsung, karena dalam RPJMD terdapat persoalan dan solusi dari setiap masalah pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kita sudah *on the track*, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus konsisten menjalankan kinerja yang sudah ditetapkan agar masyarakat merasakan apa yang dilakukan Pemkab Kotawaringin Timur. Selain itu dalam mewujudkan birokrasi yang efisien tidak cukup hanya dengan sekedar memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan dari anggaran tersebut ([www.kotimkab.go.id](http://www.kotimkab.go.id)).

Penelitian Gomes, Alfinito dan Albuquerque (2013) menganalisis kinerja pemerintah daerah di Brazil tahun 2002-2008. Fitriani dan Dwirandra (2014) menilai kinerja pemerintah daerah Bali tahun 2007-2011 dengan menggunakan rasio keuangan. Rempowatu dan Tirayoh (2016) mengukur kinerja pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011-2014 dengan rasio keuangan. Susilowati, Retnowulan dan Widiyanti (2018) menilai kinerja pemerintah daerah Kota Bogor tahun 2012-2016 dengan rasio keuangan. Pandjaitan, Tommy dan Untu (2018) menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Manado tahun 2011-2016 dengan rasio-rasio keuangan.

Penelitian sebelumnya hanya meneliti di satu dan dua daerah atau hanya sebagian daerah dan menggunakan beberapa rasio keuangan. Penelitian ini akan mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan membandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan rasio keuangan yang diharapkan memberikan informasi dan hasil yang maksimal mengenai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat desentralisasi, kemandirian, ketergantungan, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting theory*)**

*Goal Setting theory* merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Locke, 1968. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah sebuah organisasi yang memahami tujuan atau sasaran (apa yang diharapkan organisasi). Sasaran dapat dipandang sebagai tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

### **Pemerintah Daerah**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Keuangan daerah diartikan adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Mamesah dalam Halim, 2001:19). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan

yang ada di daerahnya. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan rencana pengeluaran dan penerimaan daerah. Menurut UU No 23 tahun 2014 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan perundang-undangan yang merupakan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja (Susilowati, Retnowulan, Widiyanti: 2018). PPNo. 58 tahun 2005 dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang telah atau yang akan dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Mardiasmo (2013) Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan dan perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan pelayanan yang baik kepada publik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan rasio sebagai berikut:

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat desentralisasi dihitung Berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi: 2010).

**Tabel 1. Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan	Desentralisasi keuangan (%)
Sangat rendah	0 – 25
Rendah	> 25 – 50
Sedang	> 50 – 75
Tinggi (mandiri)	> 75 – 100

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

b) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (Mahmudi, 2010:142). Rasio kemandirian dapat dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan pendapatan Transfer atau PAD dengan total pendapatan daerah.

**Tabel 2. Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

c) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.

**Tabel 3. Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan	Ratio Ketergantungan (%)
Sangat rendah	0 – 25
Rendah	> 25 – 50
Sedang	> 50 – 75
Tinggi (ketergantungan)	> 75 – 100

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

d) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan jumlah target dan realisasi PAD pada periode tersebut.

**Tabel 4. Kategori Efektivitas Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

e) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim2007: 234).

**Tabel 5. Kriteria Efisien Kinerja Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

f) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode (Halim, 2004: 291). Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138).

**Tabel 6. Kriteria Tingkat Pertumbuhan**

Kriteria	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0 – 10
Rendah	11 – 20
Sedang	21 – 30
Tinggi	Diatas 40

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fakta dan menggambarkan fenomena secara mendetail. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan data sekunder yang diperoleh dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan BKAD Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL PENELITIAN

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**

No	Rasio Keuangan	Tahun (%)					Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Derajat Desentralisasi	12,19	7,75	11,23	11,25	15,58	11,60
2	Kemandirian	12,19	7,75	11,23	11,25	15,58	11,60
3	Ketergantungan	73,27	77,88	68,33	71,51	69,78	72,15
4	Efektivitas	146,63	82,44	117,91	107,50	122,68	115,43
5	Efisiensi	100,00	100,00	88,82	82,80	80,27	90,38
6	Pertumbuhan	37,80	-36,35	71,42	18,97	29,88	24,34

Sumber: Data Sekunder diolah Tahun 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kategori sangat rendah. Rata-rata rasio derajat desentralisasi tahun 2013 - 2017 adalah sebesar 11,60% artinya jumlah PAD masih relatif kecil dibanding total penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Persentase rasio kemandirian Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rata-rata persentase dari tahun 2013 - 2017 yaitu sebesar 11,60% dengan pola hubungan intruktif di mana pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan kemandirian daerah itu sendiri. Rasio ketergantungan yaitu sebesar 72,15% yang artinya rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kategori sedang.

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Kotawaringin Timur untuk anggaran tahun 2013 - 2017 sudah baik karena masih menunjukkan pola hubungan yang efektif yaitu rata-rata diatas 100%. Dilihat dari pertumbuhan rasio efektivitas juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis perbandingan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2013 - 2017 rata-rata 90,38%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kategori kurang efisien.

Rasio Pertumbuhan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2017 hingga -36,35%. Rata-rata rasio pertumbuhan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 24,34% masuk dalam kategori sedang. Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola PAD dengan cara menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada misalnya di sektor pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum dapat dikatakan baik jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tabel terlampir dapat dilihat besaran rasio seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan perbandingan antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **PEMBAHASAN**

Data yang dikumpulkan berupa laporan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 - 2017. Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dihitung dengan rasio Derajat Desentralisasi masuk dalam skala 0 - 25% dan masih dalam kategori rendah sekali yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik karena kontribusi PAD relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari perhitungan rasio kemandirian masih dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif untuk tahun 2013 - 2017 dalam skala 0 - 25% yang artinya peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian daerah itu sendiri. Pemerintah daerah belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tingkat yang sedang terhadap pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan skala 50 - 75% yang disebabkan rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kategori sangat efektif dengan skala > 100%. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mampu merealisasikan besaran PAD yang sudah ditargetkan. Pemerintah daerah dianggap sangat mampu untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang sudah ditargetkan. Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami tingkat efisien yang kurang efisien (skala 90-100%). Hal itu terjadi karena realisasi pendapatan sama besarnya dengan realisasi belanja daerah. Artinya total biaya yang dikeluarkan besar untuk merealisasikan pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum bisa memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami tingkat pertumbuhan dalam kategori sedang (skala 21-30%). Hal ini terjadi karena PAD setiap periode meningkat namun tidak signifikan. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus mampu mengelola PAD dengan cara menggali potensi daerah.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi mengalami kenaikan, akan tetapi masih dalam skala 0-25%. Artinya PAD relatif lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat rendah. Di mana pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dianggap belum mampu membiayai kebutuhan dan kegiatan daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Ketergantungan dalam kategori

sedang, yang artinya pemerintah daerah mengalami tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 – 2017 berdasarkan Rasio efektivitas masuk dalam kategori sangat efektif yang artinya pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD yang ditargetkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 – 2017 berdasarkan Rasio efisiensi dalam skala 90 – 100% yaitu dalam kategori kurang efisien yang artinya pemerintah daerah belum bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 – 2017 berdasarkan Rasio pertumbuhan masuk dalam kategori sedang, yang artinya pemerintah pusat harus mampu meningkatkan pengelolaan PAD dengan menggali potensi baru atau mengembangkan potensi daerah yang sudah ada. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum dapat dikatakan baik bersamaan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangkaraya jika dilihat dari besaran rasio keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Dharmaputra. Jakarta
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996. Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Edwin, Locke. 1968. "Toward a Theori of Tasks Motivation an Incentives". *American Institutes for Research* 12: 19-64
- Fitriani, Ni Luh Putu dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. "Penilaian KinerjaKeuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2011" *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 8.1 Hal:211-227
- Gomes, Ricardo Correa, Solange Alfinito, and Pedro Henrique Melo Albuquerque. 2013."Analyzing Local Government Financial Performance: Evidencefrom Brazilian Municipalities 2005-2008". *ANPAD Artigo recebido em*18.03.2013. Última versão recebida em 04.08.2013. Aprovado em 05.08.2013
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim, A.. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A.. 2007. *Akuntansi danPengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua*.UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta
- Pandjaitan, Marina F., Parengkuan Tommy dan Victoria N. Untu. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016". *Jurnal EMBA*. Vol.6 No.3 Juli 2018, Hal. 1398 – 1407
- Rempowatu, Jelin dan Victorina Tirayoh. 2016. "Pengukuran Kinerja KeuanganPada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014" *Jurnal Emba* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 982-989
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005*. Tentang Kinerja Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang No. 23 tahun 2014*. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Susilowati, Isnurrini Hidayat., Julia Retnowula dan Wiwik Widiyanti. 2018."Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 – 2016"*Widya Cipta*, 2(2), 193–200.
- <https://dprd-kotimkab.go.id/2018/01/31/pemkab-kotim-raih-penghargaan-akuntabilitas-kinerja-baik-dari-kemenpan-rb/> diakses 23 Oktober 2018